

Daftar Pustaka

Buku

- Agustina, Enny, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Ahmad, Jamaludin, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi*, Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta.
- Arimbi, Diah, 2022, *Konsep Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia*, Penerbit Wawasan Ilmu: Banyumas.
- Astawa, Gde Pantja dan Na'a, Supri. 2022. *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Refika Aditama: Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2019, *Ilmu Negara, dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Raja Grafindo: Depok.
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2014, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, UGM Press: Yogyakarta.
- Gunadi, Rina dan Muchtar Masrudi, 2020, *Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Thema Publishing*: Yogyakarta.
- Hadjon Philipus dan Djatmiati Tatiek, 2017, *Argumentasi Hukum*, UGM Press: Yogyakarta.
- Hardiyansyah, 2015, *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*, Gava Media: Yogyakarta
- Herdiansyah, Haris, 2019, *Wawancara, Observasi, dan FGD sebagai Instrumen penggalan Data Kualitatif*, PT. Rajawali Press: Depok.
- Ilyas, Amir dan Nursal Muhamad, 2020, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Mulyawan, Setiawan, 2015, *Manajemen Risiko*. CV. Pustaka Setia: Bandung
- Nawawi, Hadari dan Hadari Martini, 2006, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Nurmadjito, 2015, *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik, Amanat Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat*, CV. Mandar Maju: Bandung
- Purwanto, Bambang Heru dan Afandi, Muhammad Nur, 2021, *Manajemen Strategi Sektor Publik*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Rahayu, Amy dan Juwono Wisnu, 2019, *Birokrasi dan Governance, Teori, Konsep dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Rahayu, Amy dkk, 2020, *Pelayanan Publik dan E-Government, Sebuah Teori dan Konsep*, Rajawali Pers: Depok.
- Rosyida, Desta Ayu Cahya, 2021, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan pada Petugas Pelayanan Kesehatan*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Saleh, Muwafik Akhmad, 2021, *Komunikasi Pelayanan Publik*. Intrans Publishing: Malang.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers: Depok
- Setiawan, Yudhi dan Hadiatmodjo Boedi dkk, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Perkasa: Depok.
- Sihombing, Eka dan Marwan, Ali, 2021, *Ilmu Perundang-Undangan*. PT. Citra Intrans Selaras: Malang.
- Sinamo, Nomensen, 2020, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Penerbit Jala Permata Aksara: Jakarta.
- Suganda, Munandar Wahyudin, 2017, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011, *Administrasi Publik, Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sukendar dan Santoso, Aris, 2022, *Pengantar Hukum Jaminan*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria, 2021, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM Press: Yogyakarta.
- Suteki dan Taufani Galang, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Trisnantoro, Laksono, 2019, *Kebijakan Pembiayaan dan Fragmentasi Sistem Kesehatan*, UGM Press: Yogyakarta.

Yahya, Makmur Jaya, 2020, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran kepada Tenaga Kesehatan dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*, PT. Refika Aditama: Bandung.

Jurnal Penelitian & Laporan

Septian Fajar Ilham dan Abdurahman Ali. *Status Hukum Penjelasan Undang-Undang berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 51 No. 3 Tahun 2020

Hermanto Bagus, dkk. *Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 3 Tahun 2020

Tim Penulis BPK, 2021, *Pendapat BPK tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Tahun 2021*, Badan Pemeriksa Keuangan: Jakarta, hlm 13

Tim Peneliti LBH Jakarta & MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, Penelitian Putusan-Putusan Mahkamah Agung pada lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006 – 2013*, LBH Jakarta: Jakarta

Tesis dan Disertasi

Agriani, Kurnita Agriani. 2019. *Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Penegakannya sesuai dengan Undang-Undang Negara dan Penegakannya sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Astiana, Ayu Hapsari. 2020. *Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Madubaru, Pabrik Gula Pabrik Spiritus (PG.PS) Madukismo Yogyakarta*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Hakim, Dhia Putri Kamilia. 2021. *Keberadaan Asas Kebebasan berkontrak dan Kepastian Hukum dalam Program Jaminan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus Hotel “X” V Serikat Pekerja Hotel “x”)*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) Juncto Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542)

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666) Juncto Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1634)

Putusan Pengadilan

Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, perihal Gugatan Perkara Siti Khalimah, 12 Desember 2018

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 498/PDT/2019/PT DKI perihal Banding Perkara BPJS Kesehatan, 31 Oktober 2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 260/K/Pdt/2020 perihal Kasasi Perkara BPJS Kesehatan, 22 Oktober 2020

Internet

Burhan, Papua 60 Detik, “Akhirnya BPJS Kesehatan bayar kerugian keluarga moker PT. Freeport”, <https://papua60detik.id/berita/akhirnya-bpjs-kesehatan-bayar-kerugian-keluarga-moker-ptfreeport>, diakses 15 April 2023 Pukul 16.10 WIB

Dina Lathifa. “New Edabu 4.2: Aplikasi BPJS Kesehatan untuk Karyawan” diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/new-edabu-bpjs-kesehatan> pada 28 Januari 2024 Pukul 19.15 WIB

Kemendikbud. “Mungkin”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mungkin> diakses pada 05 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB

Mukti, Ali Ghufon. 2021. *Penyelenggaraan JKN Tak Lepas dari Risiko Hukum, BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan*. Dikutip dari Bisnis.com pada <https://finansial.bisnis.com/read/20210809/215/1427838/penyelenggaraan-jkn-tak-lepas-dari-risiko-hukum-bpjs-kesehatan-gandeng-kejaagung> yang diakses pada 30 Mei 2022 Pukul 14.45 WIB.

Niervana, Anendya. *Regulasi: Pengertian, Bentuk dan Teori*. https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/#Teori_dalam_Regulasi, di akses pada 08 April 2023 Pukul 15.53 WIB

Ombudsman RI, “Success Story Ombudsman: Perusahaan Nonaktifkan BPJS Kesehatan 243 Pekerja, Ombudsman turun tangan”, <https://ombudsman.go.id/gallery/video/read/681> diakses pada 13 November 2023 Pukul. 14.20 WIB